KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TAHUN 2023

UNIT KERJA	:	DINAS KOMINFOTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON	:	BIDANG SIBER DAN SANDI
PROGRAM	:	PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
NAMA KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
HASIL *(outcome)*	:	MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CamScanner

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan informasi milik pemerintah daerah sebagai penopang terwujudnya keamanan informasi.

Keamanan sistem informasi tidak hanya melibatkan kontrol keamanan secara teknis, namun juga melibatkan kontrol administratif, prosedural, manajemen dan operasional secara teknis dalam menjaga kelangsungan asset informasi organisasi.

Kesadaran keamanan informasi adalah bagian bidang ilmu keamanan yang berhubungan dengan faktor manusia mengenal keamanan aset informasi , sehingga faktor SDM merupakan faktor utama dan penting dalam pengamanan informasi selain teknologi karena manusia merupakan rantai terlemah dalam rantai keamanan.

Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keamanan informasi, maka diperlukan upaya untuk peningkatan kompetensi bagi pengelolanya.

Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan informasi akan lebih baik dan maksimal jika didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mampu dalam mengelola, menyediakan dan mengembangkan kompetensi dibidang keamanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi baik dari aspek kepemimpinan, manajerial, dan kompetensi teknis secara baik dan benar.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam hal Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan informasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

B. Tujuan

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di bidang Siber Sandi.
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi yang berorientasi pada kesiapan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi.

C. Dasar Hukum

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;

CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Preseiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemeritah Daerah;
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Mengadakan Sosialisasi Keamanan Informasi dan Workshop SDM Pengelola Persandian Provinsi dan Kabupaten/kota se Sumatera Barat;
2. Melakukan Monev Pengelolaan SDM Keamanan Informasi ke Kabupaten/Kota;
3. Membuat laporan dari kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi Dalam Rangka meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

CamScanner

E. Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Administrasi												
2.	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat												
3.	Terlaksananya Monev Pengelolaan SDM Keamanan Informasi ke Kab/Kota												
4.	Terpenuhnya SDM Pengelola Persandian Provinsi dan Kab/Kota												
5.	Terselenggaranya Sosialisasi Keamanan Informasi												
6.	Terselenggaranya Workshop SDM Pengelola Persandian												
7.	Penyusunan Laporan Akhir												

F. Masukan (Input) :

a. Dana : Rp. 69.792.422,-

b. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Barat

c. SDM : Bidang Siber dan Sandi

d. Waktu : 12 Bulan

G. Keluaran (Output) :

a. Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Informasi.

b. Terselenggaranya Workshop SDM Pengelola persandian

H. Hasil (Out Come)

a. Tersedianya SDM Pemerintah Daerah dibidang Persandian dalam pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Komunikasi.

b. Meningkatnya Analisis Kebutuhan TIK dengan adanya Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah pada bidang Persandian yang lebih berkualitas;

CamScanner

I. Manfaat (Benefit)

Terciptanya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi yang handal dan terwujudnya Analisis Kebutuhan yang tepat sasaran pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dengan adanya SDM Pengelola Persandian yang handal.

Padang, Januari 2023

Kepala Bidang Siber dan Sandi

Eko Paisal, S.Kom., M.M.

NIP. 19691125 199503 1 004

CamScanner